

PERUBAHAN SOSIAL DAN KETAHANAN KELUARGA: MERETAS KEBIJAKAN BERBASIS KEKUATAN LOKAL

SOCIAL CHANGES AND FAMILY RESILIENCE: INITIATING LOCAL POWER-BASED POLICIES

Soeradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 24 Maret 2013, Disetujui: 28 April 2013

Abstrak

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama proses sosialisasi setiap individu sebagai sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Oleh karena itu, setiap keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam aspek ekonomi, sosial, psikis dan budaya. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan, dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi dan perannya atau keluarga dalam situasi disorganisasi sosial. Tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi sosial di masyarakat. Berdasarkan kajian kepustakaan, dewasa ini telah terjadi perubahan peranan dan fungsi keluarga, yang mengakibatkan ancaman dan gangguan terhadap ketahanan keluarga. Kasus yang cukup mencemaskan akhir-akhir ini, adalah tindak kekerasan dan pembunuhan anak dilakukan oleh orang tua dari rumah tangga miskin yang diakibatkan stress dan depresi. Merespon posisi strategis keluarga dalam pengembangan sumber daya manusia, maka diperlukan strategi penguatan ketahanan keluarga. Strategi dimaksud berbasis organisasi lokal yang ada di masyarakat, sebagaimana yang sudah diinisiasi oleh pemerintah. Pada strategi tersebut dikembangkan jejaring kerja antara organisasi lokal, sehingga sumber daya pada mereka dapat disinergikan untuk tujuan bersama mewujudkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: perubahan sosial, kebijakan sosial, ketahanan keluarga, kekuatan lokal.

Abstract

The family is the first and foremost institution of socialization processes of each individual as a qualified human resource for development. Therefore, each family is expected to have the ability to carry out the functions and role in the economic, social, psychological and cultural. Social changes taking place in society, influence is not beneficial for the family, both in urban and rural areas. Some families are not able to survive, and to change the shape, structure, function and role of the family in situations or social disorganization. This paper discusses the problems faced by families along with social change and social transformation in society. Based on the literature, today has changed the role and functions of the family, resulting in threats and disruption to family resilience. The case is quite worrying lately, is the violence and killings carried out by the child's parents from poor households resulting from stress and depresi. Responding to the strategic position of the family in the development of human resources, it is necessary to strengthen family resilience strategy. The strategy is based on local organizations in the community, as that has been initiated by the government. In the strategy developed networking between local organizations, so that those resources can be synergized to achieve the common goal of family resilience.

Keywords: social change, social policy, family resilience, local forces.

PENDAHULUAN

Kesatuan sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat manusia adalah keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting, karena di dalam sebuah keluarga berlangsung proses sosialisasi yang akan berpengaruh besar terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap individu, baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, tugas utama keluarga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial semua anggotanya, mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, membimbing perkembangan pribadi, serta mendidik agar mereka hidup sejahtera.

Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menegaskan bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut memberikan penegasan kepada seluruh keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa keluarga memiliki posisi sentral dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terdapat cita-cita yang ingin dicapai oleh Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009, yaitu; 1) terwujudnya keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 2) terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga dengan ciri-ciri memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Kemudian pada Pasal 5 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keluarga ditempatkan pada inti dan sentral pengembangan kekuatan bangsa dan negara, karena secara fenomenologis rakyat menyatu pada keluarga-keluarga. Kekuatan keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Sebaliknya kelemahan keluarga adalah cermin buram pemerintah dalam menjalankan roda manajemen kepemimpinannya mengayomi, memberikan bimbingan, motivasi, stimulasi, dan variasi alternatif bagi rakyat melakukan pilihan hidupnya (Tumanggor, 2010).

Secara universal setiap keluarga memiliki sejumlah fungsi. Menurut Zastrow (1999), keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

1. *Replacement of the population*, yaitu fungsi keluarga untuk regenerasi atau melanjutkan keturunan.
2. *Care of the young*, yaitu fungsi pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
3. *Sosialization of new members*, yaitu fungsi untuk mesosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa dan lain-lain kepada anggota keluarganya.
4. *Regulation of social behavior*, yaitu fungsi pengartuan perilaku seksual. Kegagalan pengaturan perilaku seksual akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
5. *Source of affection*, yaitu fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

Kemudian menurut Soekanto (2004), sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan sebagai berikut:

1. Keluarga batih berperanan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah itu.
2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara meteriil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
3. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka keluarga akan melahirkan individu-individu yang sehat secara fisik, memiliki kecerdasan, berbudi pekerti, berakhlak mulia dan memiliki rasa kesetiakawan sosial. Keluarga merupakan sistem sumber informal yang memberikan perlindungan dan cinta kasih bagi individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai lembaga primer dan fundamental sebab mengemban fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa.

Dewasa ini keluarga menjadi salah satu isu tematik pembangunan sosial, baik nasional maupun global. Tidak sedikit keluarga yang mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut telah menggoyahkan eksistensi keluarga, sehingga keluarga rentan mengalami kegoncangan, tidak memiliki ketahanan atau mengalami disorganisasi. Sebagaimana terjadi dewasa ini, dimana arus transformasi sosial yang mengiringi proses perubahan sosial tidak

dapat dicegah, dan memasuki ranah kehidupan manusia di semua bidang kehidupan.

Fenomena perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan perempuan dan anak serta tawuran pelajar, merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga. Corak kehidupan materialistis dan individualistis, nampaknya sudah merasuki kehidupan sebagian keluarga di Indonesia, sebagaimana dilansir berbagai media massa nasional dewasa ini.

Negara dan pemerintah sesungguhnya sudah memberi peluang terhadap fenomena sosial tersebut. Kebijakan dalam bentuk perundang-undangan telah diterbitkan, seperti Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal, apabila didukung dengan pemahaman yang sama dan komitmen dari semua komponen bangsa, baik di pusat maupun di daerah.

PEMBAHASAN

Dampak Perubahan Sosial

Sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia adalah perubahan sosial. Secara cepat ataupun lambat setiap masyarakat dan bangsa di manapun berada akan mengalami perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial tersebut, ada yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan tersebut sebagai kegiatan “pembangunan”, karena ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut JL Gillin dan JP Gillin (Asra, 2012), perubahan sosial adalah suatu variasi

dari cara hidup yang diterima masyarakat, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian, Mac Iver (Asra, 2012) mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Berdasarkan definisi dan pengertian perubahan sosial tersebut, bahwa perubahan sosial di dalamnya meliputi perubahan cara hidup, perubahan hubungan sosial dan perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial tersebut terjadi sebagai akibat perubahan material (geografis, teknologi) maupun immaterial (demografis, ideologi, difusi, dan hubungan sosial).

Pengaruh yang dirasakan oleh keluarga dengan terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan global dewasa ini, menurut Hawari yang dikutip oleh Suradi (2005) seperti struktur keluarga yang semula "*extended family*" cenderung ke pola "*nuclear family*". Hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat (*family tight*), cenderung longgar dan rapuh (*family loose*), ambisi karier dan materi yang tidak terkendali yang bersifat "obsesif kompulsif" telah mengganggu hubungan interpersonal. Terjadinya perubahan struktur keluarga tersebut tidak hanya terbatas pada berubahnya bentuk keluarga dari keluarga batih menjadi keluarga inti saja. Akan tetapi menurut Soelaiman yang dikutip oleh Suradi (2005) muncul bentuk-bentuk keluarga baru, seperti keluarga tunggal, keluarga yang dikepalai wanita muda, keluarga yang hidup bersama, keluarga kontrak, keluarga bayangan dan keluarga homo seks.

Selain terjadinya perubahan pada struktur keluarga, perubahan sosial budaya membawa dampak yang kurang menguntungkan

bagi keluarga, seperti tempat bekerja yang jauh dari rumah, berpisahannya suami dengan istri dan berpisahannya orang tua dengan anak dalam waktu yang lama setiap harinya. Hal ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens. Akibatnya proses tumbuh kembang anak akan terpengaruh, yaitu terjadinya kelambatan pada fungsi jasmaniah, perkembangan intelegensi dan emosi serta kelambatan psikis (Sadli, 1980 dan Kartono, 1989).

Menurut Adi (2012), masyarakat mengalami perubahan sosial yang membuatnya semakin sulit untuk membangun atau memelihara hubungan sosial. Masyarakat mengalami isolasi budaya dan isolasi ekonomi yang disebabkan oleh tingginya mobilitas keluarga. Perubahan sosial tersebut mendorong ke arah intensitas kehidupan modern yang bertentangan dengan pembentukan dan pemeliharaan jaringan sosial lokal bagi keluarga dan anak-anak mereka.

Permasalahan tersebut terjadi, karena keluarga tidak mampu menampilkan peranan, fungsi dan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Menurut Zastrow (1999), berbagai permasalahan di dalam suatu keluarga, dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ekonomi, termasuk di dalamnya pencari nafkah yang menganggur, kesulitan mengelola keuangan, kemiskinan; dan pencari nafkah meninggal dunia, cacat, pensiun diri, sakit-sakitan, sakit kronis, korban kejahatan, dan penahanan.
2. Sosial, termasuk di dalamnya kehamilan yang tidak dikehendaki, suami atau isteri ditinggalkan, perkawinan yang hambar, perceraian, tindak kekerasan terhadap isteri, anak-anak dan lanjut usia; perjudian, alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan; masalah penyimpangan perilaku anggota keluarga, anak kabur dari rumah, dan ketidaksetiaan suami isteri.

3. Psikis, termasuk di dalamnya masalah-masalah emosional anggota keluarga, pemerkosan dan tertularnya HIV/AIDS.

Keluarga yang hakikatnya sebagai lembaga pertama dan utama berlangsungnya tumbuh kembang anak, dewasa ini juga tidak terlepas dari terpaan gelombang transformasi sosial. Menurut Soelaiman yang dikutip oleh Suradi (2005), konsep keluarga yang semula merupakan kesatuan sosial terkecil, yang terdiri ayah, ibu dan anak yang terbentuk melalui perkawinan, telah mengalami perubahan. Unsur ayah, ibu, anak dan perkawinan tidak selalu terpenuhi dalam konsep keluarga dewasa ini. Berubahnya struktur keluarga ini, tentu akan mempengaruhi peran dan fungsi keluarga.

Kemudian dikemukakan Susanto (1984), bahwa pemakaian teknologi maju dewasa ini telah mengarah pada corak industrialisme, yang ditandai dengan timbulnya dampak sosial primer maupun dampak sosial sekunder di masyarakat. Dampak sosial primer dicirikan dengan terjadinya urbanisasi, peningkatan mobilitas sosial secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan dampak sosial sekunder dicirikan dengan adanya gejala berubahnya cara hidup dan hubungan dalam keluarga, berkurangnya wibawa lembaga tradisional dan timbulnya kebutuhan rekreasi yang baru.

Dewasa ini muncul fenomena dimana keluarga merupakan tempat terjadinya tindak kekerasan atau yang dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keluarga melakukan eksploitasi secara ekonomi kepada anak-anaknya, keluarga melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) anggota keluarganya, keluarga menyediakan lingkungan yang tidak nyaman, dan tidak memberikan dukungan secara psiko-sosial bagi tumbuh kembang anak-anaknya (Anonim, 2006; Suradi, 2006; Mujiyadi dkk, 2011).

Menuju Ketahanan Keluarga

Menurut Achir (1999), suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperanan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Menurut pemikiran Achir tersebut, cara untuk mengetahui ketahanan keluarga dengan mencermati pelaksanaan sejumlah fungsi keluarga. Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyangan eksistensinya.

Kemudian menurut Megawangi, Zeitlin dan Garman (Sunarti dkk, 2003), ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga. Dari dua definisi tersebut, unsur-unsur di dalam ketahanan keluarga adalah pengelolaan sumber daya manusia, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Dikemukakan oleh Budhi Santoso (1994) dalam tulisannya "*Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pembinaan Kualitas Sumber Daya Manusia*", bahwa betapapun sederhananya kehidupan suatu keluarga, pasti mengembangkan organisasi sosial yang masing-masing menjamin ketertiban dan

pencapaian tujuan hidup bersama. Organisasi sosial itu pada intinya meliputi pengaturan hubungan sosial antar anggota (*social alignment*), cita-cita atau tujuan bersama yang mengikat kesatuan sosial yang bersangkutan (*social media*), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam pergaulan sosial (*social standard*) dan penegakan ketertiban hidup bersama (*social control*). Berdasarkan pemikiran ini, maka setiap orang, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat terikat oleh keempat norma sosial tersebut dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Suyono (1994), dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat dewasa ini, keluarga hendaknya dipersiapkan dengan peranan ganda, yaitu:

1. Setiap keluarga mampu mengadakan penyesuaian diri agar bertanggung jawab sebagai pengayom seluruh anggota keluarganya sendiri. Dalam hal ini peranan keluarga sebagai wahana persemaian dan pelebagaan nilai-nilai luhur, mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, membangun seluruh potensi mejadi sumber daya insani dan mempunyai berbagai kemampuan lain untuk mendukung pembangunan bangsa.
2. Setiap keluarga harus mampu meningkatkan kemampuannya karena harus selalu siap melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekitarnya yang terus berubah.

Kemudian, dikemukakan oleh Gidden (1998), untuk mempertahankan ketahanan keluarga, perceraian harus dipersulit. Ketidakberesan dalam perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak-anak harus dilakukan perbaikan mulai dari menerapkan prinsip kesamaan derajat antar jenis kelamin. Kemudian keluarga didorong untuk mengembagkan prinsip demokrasi atau terdemokraskan,

melalui proses-proses sebagaimana yang berlangsung dalam demokrasi publik. Melalui mendemokraskan keluarga itu, maka akan menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga akan memadukan pilihan individu dan solidaritas sosial. Demokrasi dalam konteks keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan bebas dari kekerasan.

Goode yang dikutip oleh Solihin (2007), dengan menggunakan pendekatan struktural mengemukakan bahwa peningkatan ketahanan keluarga dilakukan agar terjadi keserasian dalam hal:

1. Hubungan antara keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas, maksudnya sistem ketetangaan, istitusi ekonomi, politik/pemerintahan, institusi hukum, agama dan lain-lain. Bila tercipta keharmonisan, maka dihasilkan kondisi ketahanan keluarga yang tinggi, artinya keberadaan institusi tersebut akan mendukung terciptanya ketahanan keluarga.
2. Hubungan antara keluarga dengan subsistemnya bisa berarti hubungan antara anggota keluarga, atau antara keluarga dengan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga tersebut yang pada gilirannya menghasilkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi goncangan. Dalam kaitan menciptakan katahanan keluarga yang sejalan dengan pembangunan sosial, maka internalisasi nilai tentang kejujuran, kurukunan, keuletan dan lain-lain merupakan hal yang dianjurkan untuk dimiliki setiap keluarga.
3. Hubungan antara keluarga dengan kepribadian anggotanya berkaitan dengan bagaimana peran orangtua dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik utama individu dalam kelompok primernya, sehingga menghasilkan individu-individu dengan pribadi yang tangguh, ulet,

tahan guncangan yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang berketahanan tinggi.

Pemikiran Goode tersebut menekankan, bawa ketahanan keluarga dapat dibangun melalui pengembangan interaksi dan relasi sosial yang harmonis, baik antara anggota keluarga, anggota keluarga dengan sistem nilai dan norma dalam keluarga; maupun anggota keluarga dengan masyarakat dan institusi-institusi yang ada di masyarakat.

Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa dewasa ini keluarga berada pada dua sisi yang paradog. Di satu sisi, keluarga memegang posisi sentral dalam pembangunan bangsa, dan di sisi yang lain keluarga menghadapi ancaman yang datang dari eksek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang dewasa ini terjadi di masyarakat, ditandai dengan semakin menguatnya emansipasi dan peluang wanita di semua sektor kehidupan dan pekerjaan. Pada sebagian wanita, ambisi karier tidak diimbangi dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Akibatnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial dengan anak-anaknya sangat terbatas dan tidak berkualitas. Situasi demikian ini, akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan mental spiritual anak-anaknya, sehingga tumbuh kembang anak akan mengalami gangguan (Suradi, 2012).

Selain terbatasnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial antara orang tua dengan anak, permasalahan ekonomi rumah tangga merupakan faktor lain yang mempengaruhi disorganisasi sosial keluarga. Penghasilan yang rendah di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan yang tinggi melampaui daya beli di sisi lain, dapat menimbulkan gangguan mental spiritual. Orang kemungkinan dapat stress dan bahkan depresi, apabila situasi mental spiritualnya tidak cukup kuat menghadapi permasalahan.

Pada situasi ini dapat menimbulkan kejadian yang ekstrem, seperti tindak kekerasan dalam keluarga, yang dapat berakhir dengan kematian (*news.mnctv.com, 2013*).

Merespon situasi yang berkembang di masyarakat dan tuntutan akan peranan dan fungsi keluarga, maka perlu dikembangkan kebijakan sosial yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Pada tingkat lokal, sudah banyak program-program yang dikelola oleh kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bina Keluarga Balita (BKB), diinisiasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
3. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri
4. Karang Taruna diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) diinisiasi oleh Kementerian Sosial.

Berbagai kelembagaan sosial tersebut di atas merupakan kekuatan atau potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat pada tingkat lokal. Meskipun tumbuhnya diinisiasi pemerintah, namun dalam pengelolaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Peranan pemerintah memberikan bimbingan dan asistensi, baik pada aspek kelembagaan maupun pada aspek program dan kegiatan.

Selain kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah, pada tingkat lokal secara alamiah tumbuh kelembagaan sosial yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai mekanisme pemecahan masalah yang dihadapi.

Kelembagaan sosial dimaksud seperti kelompok kematian, kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok kesenian dan sebagainya. Pada umumnya, mereka memberikan pelayanan masih terbatas bagi anggota saja, sehingga manfaatnya kurang dirasakan secara luas.

Berbagai kelembagaan sosial yang merupakan kekuatan lokal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya masih sendiri-sendiri, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Belum ada jejaring kerja di antara mereka dalam melaksanakan kegiatan, padahal mereka memiliki sasaran keluarga-keluarga pada tingkat lokal. Mereka memberikan pelayanan masih sebatas anggotanya saja, dan belum menjangkau keluarga-keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, program-program tersebut belum cukup signifikan mengatasi permasalahan keluarga. Indikasi yang menunjukkan belum optimalnya program-program keluarga sangat mudah dikenali yaitu masih tingginya angka kemiskinan, ketelantaran dan tindak kekerasan dalam keluarga di Indonesia. Permasalahan klasik yang terjadi, bahwa program dilaksanakan dengan mekanisme *top-down*, bersifat "*hit and run*", penekanan pada kapitalisasi ekonomi, pendampingan sangat lemah dan tidak berkelanjutan. Selain itu, ego sektoral tidak dipungkiri masih sangat kuat. Kementerian/Lembaga pemerintah yang mengembangkan program kesejahteraan keluarga sebagaimana disebutkan di atas, sulit untuk mengembangkan keterpaduan. Masing-masing ingin menonjolkan programnya, padahal program tersebut dilaksanakan pada lokasi yang sama.

Mengapa jejaring kerja itu penting? Dikemukakan oleh Lawang (2005), bahwa jaringan terjemahan dari *network*, yang kata dasarnya *net* (jaring, jala) yang berhubungan satu sama lain melalui simpul-simpul. Pada pengertian *network* tersebut, sebenarnya

tekanannya pada *work*-nya bukan hanya pada *net*-nya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam konteks modal sosial, jaringan mengandung pengertian, yaitu:

1. Adanya ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial. Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan yang dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
2. Adanya kerja antar simpul yang membentuk kerja sama, bukan kerja bersama-sama.
3. Kerja yang terjalin antara simpul akan membawa beban secara bersama-sama, dan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi.
4. Setiap simpul yang menjalin jejaring membentuk ikatan yang kuat.
5. Media dalam bentuk hubungan sosial dalam jaringan tidak terpisahkan, dan berkesinambungan.
6. Adanya norma yang mengatur dan menjaga bagaimana hubungan sosial dapat terus terpelihara dan dipertahankan.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa kelembagaan sosial lokal yang diinisiasi pemerintah, maupun yang tumbuh secara alamiah dapat dipahami sebagai potensi dan sumber daya atau kekuatan lokal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam usaha meningkatkan ketahanan keluarga, penting dikembangkan kebijakan sosial yang berbasis kekuatan lokal tersebut. Komponen di dalam kebijakan sosial tersebut, meliputi: argumentasi, tujuan, ruang lingkup dan pelaku.

1. Argumentasi pentingnya kebijakan sosial berbasis jejaring kelembagaan sosial lokal, bahwa kelembagaan sosial sebagaimana disebutkan di atas merupakan potensi dan sumber daya atau kekuatan lokal yang selama ini berada di tengah-tengah masyarakat lokal. Hubungan yang

dibangun sangat intensif, sehingga mereka memahami dengan baik situasi yang dihadapi masyarakat lokal. Selain itu, mereka juga memahami potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, yang dapat diarahkan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat lokal. Mengedepankan kelembagaan sosial lokal dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat, merupakan upaya menempatkan peranan *civil society* dalam pembangunan.

Pembangunan masyarakat dengan mengedepankan peran *civil society*, dewasa ini telah menjadi kebijakan politik di negara maju, seperti di Australia. Negara memberikan kesempatan yang luas kepada *civil society* dengan memberikan subsidi yang cukup besar untuk mengelola proyek-proyek pembangunan masyarakat. Proyek-proyek tersebut dinilai berhasil, dan menjadi *best practice in social work* di Australia (Ferity, 2013).

2. Tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya suatu kondisi keluarga yang mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dengan baik, yaitu pada aspek ekonomi, sosial dan mental spiritual.
3. Ruang lingkup kegiatan meliputi dimensi ekonomi, sosial dan mental spiritual. Secara ekonomi, ditunjukkan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Keluarga mampu mencukupi kebutuhan dasar yang meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Selanjutnya, secara sosial, mental dan spiritual ditunjukkan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan relasi sosial, penghargaan, kenyamanan, ketenangan, pengembangan potensi diri, melakukan aktivitas spiritual dan pendidikan.
4. Jejaring lembaga sosial lokal tersebut dikelola oleh perwakilan dari lembaga sosial lokal yang ditentukan secara musyawarah. Di

dalam jejaring tersebut disusun perencanaan kegiatan dan penganggaran bersama. Dari perencanaan bersama tersebut ditemukan irisan-irisan, kegiatan mana yang menjadi tugas utama pada lembaga sosial lokal, dan kegiatan mana yang disinergikan di dalam jejaring kerja.

Faktor sosial budaya dan kondisi geografs, akan banyak mempengaruhi sistem dan dinamika dalam pengelolaan jejaring kelembagaan sosial. Faktor sosial budaya tersebut antara lain dalam wujud pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang selama telah terlembaga dalam masyarakat secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut seyogyanya dapat dipertimbangkan dengan baik, demi keberlanjutan pengelolaan jejaring kelembagaan sosial dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

KESIMPULAN

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam rangka penyiapan SDM pembangunan yang berkualitas. Karena itu, institusi-institusi di luar keluarga sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung. Implikasi dari pemikiran ini, bahwa keluarga diharapkan memiliki ketahanan yang kuat, baik secara ekonomi, sosial dan mental spiritual.

Perubahan sosial dewasa ini telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha mewujudkan ketahanan penting dikembangkan

kebijakan sosial dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga secara ekonomi, sosial dan mental spiritual. Kebijakan sosial dimaksud diarahkan pada pengembangan jejaring antara kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah maupun kelambagaan sosial yang tumbuh secara alamiah. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan pemberdayaan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2006). *Survei Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2006*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Sosial RI. (2007). *Pemetaan Organisasi Lokal*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Sosial RI. (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga melalui Family Care Unit*. Jakarta: Penulis.
- Achir, Yaumil Agus. (1999). *Pembangunan Kesejahteraan Keluarga: Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa*. Prisma, Nomor 6.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Peningkatan Kapasitas Keluarga Sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Makalah disampaikan pada Pembahasan Buku Pedoman Pemberdayaan Keluarga, Bogor, Jawa Barat.
- Asra, Hafee. (2012). *Perubahan Sosial*. <http://infosos.wordpress.com/2012/03/21/perubahan-sosial/>.
- Ferity, Fione. (2013). *Best Praticce in Social Work*. Makalah disampaikan pada seminar Administrasi Kebijakan Publik, Jakarta.
- Gidden, Anthony. (1998). *The Third Way (Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial)*. Jakarta: Gramedia.
- Kartono, Kartini. (1989). *Peranan Keluarga Pemandu Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Lawang, Robert. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Markus, Sapartinah. (2012). *Optimalisasi Keluarga Sebagai PSKS: Pemberdayaan Keluarga*. Makalah disampaikan pada Pembahasan Buku Pedoman Pemberdayaan Keluarga, Bogor, Jawa Barat.
- Mujiyadi dkk. (2011). *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial. Press.
- Berita Lintas. (2013). *Lintas Siang: "Kasus Orang Tua Bunuh Anak"*. News.mnctv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23233.
- Sadli, Sapparinah, (1980). *Keluarga sebagai Lingkungan Psikososial*. Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta.
- Santoso, S. Budhi. (1994). *Ketahanan Keluarga Sebagai Basis bagi Pembinaan Keualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, Ibnu. (2007). *Keluarga Beketahanan Sosial: Tinjauan Konseptual dan Operasional*. *Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat*, Edisi III.

- Sunarti, Euis, dkk. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi dan Keluarga*, Juli, 2003, 27 (1) I-II.
- Suradi, (2005). *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Swastika Media Cipta.
-, (2006). *Perlindungan Sosial Anak di Kalimantan Barat*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
-, (2012). *Intervensi Individual: Bimbingan Psikosal*. Yogyakarta: Citra Media.
- Susanto, Astrid S. (1984). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suyono, Haryono. (1994). *Pembangunan Keluarag Sejahtera di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan GBHN*. Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN.
- Tumanggor, Rusmin. (2010). Tinjauan Konseptual Tentang Keluarga. *Informasi*, 15 (2).
- Zastow, Charles. (1999). *The Practice of Social Work (six edition)*. Illinois: Paciúc Grove, Brook/Cole Publishing Co.

